

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Negara Indonesia sendiri memiliki 38 provinsi yang membuatnya menjadi tantangan dalam pembangunan dan kebutuhan untuk setiap daerahnya. Di masa lalu pembangunan daerah di Indonesia tidak merata, dalam beberapa daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat tetapi tidak dengan daerah lainnya. Dengan adanya kesenjangan pada pembangunan ini menyebabkan kesenjangan pendapatan yang melebar, kesenjangan sosial dan kemiskinan di daerah-daerah di Indonesia. Dalam mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang mengedepankan pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan penanggulangan kemiskinan di daerah tertinggal (Bappenas.go.id,2022). Pemerintah daerah di Indonesia juga turut ikut serta dalam pembangunan daerah seperti badan-badan pembangunan daerah seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda).

Kabupaten Manggarai adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kota ini berpenduduk 382.422 jiwa (manggaraikab.go.id, 2022) dan mencakup wilayah seluas 7,136,4 km² (manggaraikab.go.id, 2022). Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah lembaga pemerintah penting yang bertugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah di kabupaten tersebut. Badan ini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah, menetapkan tujuan dan target, serta merumuskan strategi dan rencana aksi untuk mencapai tujuan tersebut. Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah memainkan

peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, karena mereka bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Namun dalam berjalannya pembangunan regional ini tidak mudah karena banyak kendala seperti korupsi, birokrasi, infrastruktur yang tidak memadai dan kekurangan SDM yang terampil.

Berdasarkan hasil wawancara dan artikel pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai, mengatakan bahwa selalu ingin mencapai hasil-hasil yang maksimal demi pelayanan bagi masyarakat. Bappelitbangda Kabupaten Manggarai, saat ini telah melakukan tugas sebagai perangkat daerah dimana mengacu pada capaian indikator yang tersedia. Dengan ini kita dapat memastikan organisasi bergerak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2022 Bappelitbangda masih belum mencapai target yang telah ditentukan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu 100% sedangkan yang dicapai ialah 48,15% yang masih jauh dari target. Hal ini menunjukkan ada adanya tantangan yang perlu diatasi oleh Bappelitbangda untuk meningkatkan kinerja instansi dalam pelayanan kepada masyarakat. Ini dibuktikan dengan capaian sasaran strategis kinerja Bappelitbangda yang menurun dari sebelumnya, pada tahun 2021 persentase capaian sasaran sebesar 88,58% namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 74,08% (LKIP Bappelitbangda, 2022). Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan analisis yang mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab dari penurunan capaian sasaran strategis dan mengambil tindakan yang terbaik untuk memperbaiki kinerja Bappelitbangda Kabupaten Manggarai.

Dalam menjalankan tugasnya faktor yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal yang akan menjadi variabel dalam penelitian ini. Teknologi informasi secara signifikan mempengaruhi kinerja organisasi di berbagai sektor, termasuk sektor publik. Dengan tuntutan dari pemerintah pusat dan masyarakat maka Bappelitbangda harus mempertanggung jawabkan setiap kerja dengan efektivitas, akuntabilitas dan

transparansi (tribunnews.com). Dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatan teknologi informasi menjadi semakin lazim. Kemajuan teknologi dan adaptasi yang terjadi dalam masyarakat menghasilkan sistem yang memudahkan dan meningkatkan efisiensi dalam setiap operasi instansi pemerintah. Misalnya, perangkat lunak dapat digunakan untuk memantau setiap transaksi yang terjadi dalam Bappelitbangda sehingga memungkinkan mengindikasikan aktivitas *fraud* (SAKIP Kab.Manggarai,2021). Demikian pula, setiap catatan elektronik dapat digunakan sebagai jejak audit sehingga hal ini memudahkan untuk mengidentifikasi penyimpangan dan melacak transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati et.al,2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Tangerang Selatan. Kemudian didukung dengan penelitian yang dilakukan (Amran,2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Palopo. Meningkatnya kinerja ini tentu saja dapat menjadi nilai tambah bagi instansi pemerintah dan juga meningkatnya penilaian masyarakat. Bertumbuhnya organisasi publik menjadi salah satu faktor pendukung bagi instansi pemerintah dalam mewujudkan *good governance*.

Namun, penggunaan TI juga menimbulkan tantangan baru bagi instansi pemerintah, termasuk perlunya sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengelola risiko yang terkait dengan adopsi teknologi. Pengendalian internal di sisi lain, sangat penting dalam memastikan bahwa instansi pemerintah beroperasi secara efektif dan efisien sambil mematuhi hukum dan peraturan yang ada. Langkah-langkah pengendalian internal ini berupa kebijakan, prosedur, dan sistem-sistem yang dibuat untuk mencegah dan dapat mendeteksi kemungkinan akan kesalahan, penyimpangan dan penipuan yang terjadi dalam organisasi. Dengan pengendalian internal, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya dan melakukan pengendalian terhadap jabatan fungsional. Dengan efesiennya pemantauan kerja, waktu, dan sumber daya lainnya dapat meningkatkan kinerja yang dari organisasi.

Dari data yang didapatkan dari LKIP Bappelitbangda Manggarai tahun 2021, secara umum kinerja yang capai sudah cukup baik namun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai sasaran 100% yaitu pada 2 sasaran Terwujudnya Rumusan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah yang *integrative* dan akuntabel. Adapun beberapa yang menjadi perhatian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai ialah mendorong kebijakan agar terakomodirnya jabatan fungsional dalam struktur Bappelitbangda dan optimalisasi kerja sama dengan Pihak Ketiga (CSR) khususnya dalam hal pendanaan. Dan adanya juga kebutuhan pendidikan Selain itu dengan jumlah hanya 5 orang aparatur/ PNS berlatar belakang pendidikan S2 masih sangat kurang, dan masih jauh dari harapan sebab jika dikaitkan dengan tupoksi kelembagaan OPD yaitu untuk membantu Bupati mengkoordinasi dan melaksanakan urusan Pemerintahan di Kabupaten Manggarai, maka akan menjadi kurang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai sebuah lembaga perencana. Adapun permasalahan lainnya ialah Ketersediaan anggaran APBD yang masih terbatas (LKIP, 2022).

Studi Purnomo dan Wicaksono (2019) meneliti dampak IT dan pengendalian internal terhadap kinerja institusi pemerintah di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa langkah-langkah TI dan pengendalian internal memiliki dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah. Studi lain juga menemukan bahwa langkah-langkah TI dan pengendalian internal meningkatkan transparansi dan akuntabilitas operasi pemerintah, meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh (Nengsih,2020) menyatakan bahwa pengendalian internal mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai bagian keuangan pada SKPD di Kabupaten Indragiri Hilir. Tetapi berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Damayanti,2017) menyatakan bahwa pengendalian internal secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Deli Serdang. Terlepas dari temuan penelitian ini, masih kurangnya penelitian yang mengeksplorasi pengaruh pengendalian intern

khususnya terhadap kinerja Bappelitbangda di kabupaten Manggarai. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini dengan mengeksplorasi hubungan antara pengendalian internal dan kinerja Bappelitbangda.

Selain pengendalian internal ada juga faktor yang menjadi variabel penelitian yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Fakta yang terjadi pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Manggarai masih dibidang belum mencapai maksimal begitu juga yang terjadi terhadap hasilnya. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, seperti latar belakang pendidikan, usia dan kurangnya minat dalam mengikuti pelatihan dan pendidikan. Adapun alasan lainnya ialah kurangnya keahlian TI yang membuat instansi daerah tidak memiliki keahlian menerapkan teknologi informasi secara efektif terbukti Bappelitbangda Manggarai hanya 2 orang yang mempunyai latar belakang teknologi informasi (Lkip Bappelitbangda Manggarai,2021). Dari data yang didapatkan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Manggarai Tahun 2021, instansi pemerintah memiliki hambatan pada teknologi informasi seperti kurangnya prasarana di bidang komunikasi dan informasi dan statistik, perlu adanya peningkatan pada tata kelola dan ekosistem *e-Government* dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan, dan masih banyak wilayah yang belum terjangkau telekomunikasi. Jika pemanfaatan teknologi informasi dapat direalisasikan dengan merata pada daerah Manggarai maka akan memberikan pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Pada Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pengembangan Daerah di Kabupaten Manggarai”***

1.2. Rumusan Masalah

Kesejahteraan masyarakat menjadi sebuah keberhasilan bagi instansi pemerintah daerah. Di era digitalisasi ini, ada faktor yang menjadi pendukung dalam perwujudan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian

pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah pada kantor Bappelitbangda di Kabupaten Manggarai.

1.3. Batasan Masalah

1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan satu sampel yaitu Bappelitbangda pada Kabupaten Manggarai.
2. Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal.

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Manggarai.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Diharapkan semua pihak yang membutuhkan dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini. Berikut beberapa manfaat penelitian:

1. Manfaat Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi, pengetahuan, dan bahan penelitian terhadap variabel-variabel terkait, seperti dampak teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Bappelitbangda Kabupaten yang dapat digunakan sebagai masukan atau bahan evaluasi untuk membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

